

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Afiah, Ratna Nurul, 1986, *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya – edisi pertama*, CV. Akademika Pressindo, Jakarta.
- Basyaib, Hamid, *et. al.*, 2002, *Mencuri Uang Rakyat, 16 Kajian Korupsi di Indonesia (Buku 3, Bantuan Asing, Swasta, BUMN)*, Yayasan Aksara, Jakarta.
- Budiarjo, Miriam, 2007, *Dasar-Dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi)*, Gramedia, Jakarta.
- Danil, Elwi, 2011, *Korupsi (Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya)*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Diantha, I Made Pasek, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Djaja, Ermansjah, 2010, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Edisi Kedua)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Hamzah, Andi, 2008, *Korupsi: Dalam Pengelolaan Proyek Pembangunan, dalam Mansyur Semma, Negara dan Korupsi*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2016, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2016, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali) – edisi kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hartanti, Evi, 2016, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hiariej, Eddy O.S., 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, 2006, *Memahami untuk Membasmi (Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi)*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta.

- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, NTB.
- Satgas BLBI Bank Indonesia, 2003, *Mengurai Benang Kusut BLBI Edisi II*, Bank Indonesia, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Sosiologi, Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2013, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soesilo, R., 1988, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- Syarif, M. Laode dan Didik E. Purwoleksono (ed), 2015, *Hukum Antikorupsi*, USAID, Kemitraan Partnership, dan The Asia Foundation, Jakarta.
- Wibowo, Agus, et. al., 2022, *Pengetahuan Dasar Antikorupsi dan Integritas*, CV Media Sains Indonesia, Bandung.
- Wignyosubroto, Soetandyo, 2002, *Hukum, Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Perkumpulan untuk Pembaruan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologi (HUMA), Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409).
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1964 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2958).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772).

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2011).

Keputusan Presiden Republik Indonesia (KEPPRES) tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia.

Peraturan Pemberantasan Korupsi Penguasa Perang Pusat (Pepperpu) No. Prt/Pepperpu/013/1950 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1052).

C. Artikel Jurnal

Abdullah, Fathin, *et. al.*, “Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Tanpa Pemidanaan (*Non-Conviction Based Asset Forfeiture*) Berdasarkan Hukum Indonesia dan *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) 2003”, *Jurnal Ilmiah “Advokasi”*, Vol. 09, No. 01, 2021.

Al Iqbal, Ahmad Faruq, *et. al.*, “Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal DINAMIKA*, Vol. 28, No. 17, 2022.

Adonara, Firman Floranta, “Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 2, 2015.

Aryasena, Bima Swastika, “Penyalahgunaan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI): Kasus Presiden Komisaris PT Bank Modern, Tbk., Samadikun Hartono”, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 5, No. 1, 2009.

Darmawan, Rachma Aulia Putri Yusuf dan Abdul Ficar Hadjar, “Tinjauan Yuridis Surat Penghentian Penyidikan Berupa Penerbitan Keterangan

- Lunas Bank Indonesia”, *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti*, Vol. 4, No. 4, 2022.
- Djufri, Darmadi, *et. al.*, “Model Pengembalian Aset (*Asset Recovery*) Sebagai Alternatif Memulihkan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”, *Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda*, Vol. 26, No. 2, 2020.
- Eleanora, Fransiska Novita, “*White Collar Crime* Hukum dan Masyarakat”, *Jurnal Forum Ilmiah*, Vol. 10, No. 2, 2013.
- Hamamah, Fatih dan Heru Hari Bahtiar, “Model Pengembalian Aset (*Asset Recovery*) Sebagai Alternatif Memulihkan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Mahkamah*, Vol. 4, No. 2, 2019.
- Hanifawati, Saida Dita, “Analisis terhadap limitasi Waktu Penyidikan oleh KPK pada Kasus BLBI”, *Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 1, 2021.
- Hatina, Damaida, *et. al.*, “SP3 KPK Atas Kasus SKL BLBI dalam Perspektif Hukum Progresif”, *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, Vol. 2, No. 12, 2021.
- Hiariej, Eddy O.S., “United Nations Convention Against Corruption dalam Sistem Hukum Indonesia”, *Jurnal MIMBAR HUKUM*, Vol. 31, No. 1, 2019.
- Imran, Hasyim Ali, “Konstruksi Media Tentang Realitas Korupsi Anggota Parlemen (Analisis Teks Norman Fairclough Terhadap Teks/Berita Korupsi Anggota DPR RI Terkait Kasus Aliran Dana BI di DPR dalam Surat kabar Media Indonesia)”, *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, Vol. 15, No. 1, 2011.
- Jaya, Bambang Eka, *et. al.*, “Kewenangan Kejaksaan Sebagai Jaksa Pengacara Negara Dalam Pengambilan Aset Hasil Korupsi”, *Jurnal of Lex Generalis (JLG)*, Vol. 2, No. 3, 2021.
- Koesoemo, Cindy Rizka Tirzani, “Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Penanganan Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. VI, No. 1, 2017.
- Kristanto, Kiki, *et. al.*, “Karakteristik Gugatan Perdata dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”, *Jurnal Palangka Law Review*, Vol. 1, No. 1, 2021.

- Kurniawan, Iwan dan Rizki Afrizal, “Gugatan Keperdataan Oleh Jaksa Pengacara Negara Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Karena Korupsi”, *Jurnal Nagari Law Review*, Vol. 5, No. 1, 2021.
- Mantolas, Edi Boni, *et. al.*, “Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Melakukan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (Analisis Perbandingan UU Nomor 30 Tahun 2002 dan UU Nomor 19 Tahun 2019)”, *Jurnal Syntax Literate*, Vol. 6, No. 9, 2021.
- Napitupulu, *et. al.*, “Pertanggungjawaban Pidana Direksi Perusahaan Maskapai Penerbangan Sipil Akibat Kecelakaan Pesawat Yang Menimbulkan Korban Jiwa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan”, *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2017.
- Nugroho, Fadziun Budi Sulisty, “Sifat Keberlakuan Asas Erga Omnes dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Gorontalo Law Review*, Vol. 2, No. 2, 2019.
- Pasaribu, Fernandos, “Asas *Nebis In Idem* dalam Putusan Praperadilan dan Pelaksanaan Pengajuan Praperadilan Lebih dari Satu Kali bagi Tersangka dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia”, *Jurnal Banua Law Review*, Vol. 3, No. 2, 2021.
- Purnamasari, Ratna, *et. al.*, “Tranformasi Penghentian Penyidikan Kasus Korupsi di Indonesia”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 10, No. 1, 2021.
- Rohrohmana, Basir, “Penerapan Ajaran Turut Serta Dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Yuridika Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, Vol. 32, No. 2, 2017.
- Rosalina, Fina, “Daluwarsa Tindak Pidana Korupsi Melalui Sudut Pndang Teori Hukum: Optimalisasi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara”, *YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 8, No. 2, 2022.
- Setyowati, Ike Indra Agus, “Pembantuan dan Penyertaan (*Deelneming*) dalam Kasus Perkosaan Anak”, *Jurnal Media Luris*, Vol. 1, No. 2, 2018.
- Sosiawan, Ulang Mangun, “Penanganan Pengembalian Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi dan Penerapan Konvensi PBB Anti Korupsi di Indonesia”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 20, No. 4, 2020.

Sugiarto, Totok, “Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 18, No. 1, 2013.

Syaifulloh, Abianto, “Peran Kejaksaan dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi”, *Indonesian Journal of Criminal Law*, Vol. 1, No. 1, 2019.

Tawaris, Glandy Brayen, “Komisi Pemberantasan Korupsi Tidak Mengenal Surat Perintah Penghentian Penyidikan”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. IV, No. 4, 2016.

Zebua, Frans Rudy Putra, *et. al.*, “Tanggungjawab Pelaku Tindak Pidana Korupsi dan Ahli Warisnya Dalam Pembayaran Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata (Studi Kasus pada Pengadilan Negeri Medan)”, *Jurnal Mercatoria*, Vol. 1, No. 2, 2008.

D. Hasil Penelitian

Fatih, Ahmad, 2019, *Analisis Yuridis Putusan Praperadilan Tindak Pidana Korupsi E-KTP dengan Tersangka Setya Novanto (Putusan Nomor: 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel)*, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember.

Haswandi, 2016, *Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pelaku dan Ahli Warisnya Menurut Sistem Hukum Indonesia*, Disertasi, Program Studi Doktor Ilmu Hukum pada Universitas Andalas, Padang.

Mukhtar, 2011, *Tinjauan Yuridis Penyelesaian Hutang BLBI Melalui Mekanisme MSAA dan Klausula Release and Discharge*, Tesis, Program Pascasarjana Magister (S-2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

E. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019 perihal pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa SAT, 9 Juli 2019.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 545 K/Pid.Sus/2013 perihal pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat kasasi atas nama Terdakwa MSG, 25 April 2013.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 140 PK/Pdt/2015 perihal pemeriksaan perkara perdata peninjauan kembali antara Negara Republik Indonesia

dengan kuasa kepada Jaksa Agung Republik Indonesia melawan Yayasan Beasiswa Supersemar, 8 Juli 2015.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 4 Mei 2021.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-I/2003 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 30 Maret 2004.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 19 Desember 2006.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XVII/2019 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, 4 Mei 2021.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 25 Januari 2017.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-X/2012 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 21 Mei 2013.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-IX/2011 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, 1 Mei 2012.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001/PUU-IV/2006 perihal pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 25 Januari 2006.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor
39/PID.SUS/TPK/2018/PN.JKT.PST. perihal pemeriksaan perkara
tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa SAT, 24 September 2018.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor
04/Pid.Prap/2008/PN.JKT.Sel. perihal pemeriksaan perkara
permohonan Praperadilan mengenai sah atau tidaknya penghentian
penyidikan atas nama Tersangka SN, 6 Mei 2008.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor
73/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel. perihal pemeriksaan perkara permohonan
Praperadilan mengenai penetapan Tersangka atas nama Tersangka SAT,
2 Agustus 2017.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor
97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel. perihal pemeriksaan perkara permohonan
Praperadilan mengenai sah atau tidaknya penetapan Tersangka atas
nama Tersangka SN, 29 September 2017.

F. Internet

Agatha, “Tiga Pelanggaran yang Dilakukan BDNI terhadap Dana BLBI”.
<https://era.id/afair/9748/tiga-pelanggaran-yang-dilakukan-bdni-terhadap-dana-blbi> (diakses pada 26 September 2022).

Akbar, Caesar, “Gedung Granadi Disita, Begini Awal Mula Kasus Yayasan Supersemar”, <https://bisnis.tempo.co/read/1148006/gedung-granadi-disita-begini-awal-mula-kasus-yayasan-supersemar> (diakses pada 23 Februari 2023).

Argawati, Utami, “Masa Kedaluwarsa Penuntutan Tindak Pidana Ciptakan Kepastian dan Keadilan”,
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18876> (diakses pada 17 Februari 2023).

Astutik, Yeni, “Kronologi Kasus BLBI Sjamsul Nursalim yang Jadi Tersangka KPK”. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190610180628-4-77436/kronologi-kasus-blbi-sjamsul-nursalim-yang-jadi-tersangka-kpk> (diakses pada 26 September 2022).

Belarminus, Roberto, “Apa Pertimbangan Hakim Tolak Praperadilan Tersangka Kasus BLBI?”,
<https://nasional.kompas.com/read/2017/08/02/19440521/apa-pertimbangan-hakim-tolak-praperadilan-tersangka-kasus-blbi-?page=all> (diakses pada 17 Februari 2023).

Belarminus, Robertus, “Hakim Gugurkan Gugatan Praperadilan Setya Novanto, Ini Komentar KPK”, <https://nasional.kompas.com/read/2017/12/14/14003351/hakim-gugurkan-gugatan-praperadilan-setya-novanto-ini-komentar-kpk> (diakses pada 15 Februari 2023).

CNN Indonesia, “Hakim Tolak Praperadilan MAKI Soal SP3 Kasus BLBI”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210629140303-12-660799/hakim-tolak-praperadilan-maki-soal-sp3-kasus-blbi> (diakses pada 23 November 2022).

CNN Indonesia, “MA Tolak PK dari KPK, Syafruddin Temenggung Tetap Lepas”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200803193930-12-531772/ma-tolak-pk-dari-kpk-syafruddin-temenggung-tetap-lepas> (diakses pada 26 Januari 2023).

CRA/IHW, “Yayasan Supersemar Resmi Digugat”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/yayasan-supersemar-resmi-digugat-hol17123?page=2> (diakses pada 23 Februari 2023).

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, “Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi”, <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ1-20170608-102159-3123.pdf> (diakses pada 21 Januari 2023).

Febriansyah, Bernady, “KPK kirim SPDP Sjamsul Nursalim ke Singapura”, <https://sumut.antaranews.com/berita/222245/kpk-kirim-spdp-sjamsul-nursalim-ke-singapura>, (diakses pada 12 Maret 2023).

Firdaus, Edwin, “Hakim Beda Pendapat Memutus Perkara Miranda Goeltom”, 31 Juli 2012, <https://aceh.tribunnews.com/2012/07/31/hakim-beda-pendapat-memutus-perkara-miranda-goeltom> (diakses pada 19 Maret 2023).

Hangesti, Bernike, “Penerapan Asas Nebis In Idem”, <https://bernikehangesti.wordpress.com/2014/05/10/penerapan-asas-nebis-in-idem/> (diakses pada 15 Februari 2023).

Harian Terbit, “Praperadilan SP3 BLBI Ditolak Hakim, MAKI Bakal Gugat Lagi”, <https://www.harianterbit.com/nasional/pr-2742015878/praperadilan-sp3-blbi-ditolak-hakim-maki-bakal-gugat-lagi> (diakses pada 12 Februari 2023).

- Hidayat, Rofiq, “Melihat Capaian Kinerja Satgas BLBI”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-capaian-kinerja-satgas-blbi-lt63f5979bd4d0a?page=all> (diakses pada 25 Februari 2023).
- Hutomo, Dimas, “Daluwarsa Penuntutan dalam Tindak Pidana Korupsi”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/daluwarsa-penuntutan-dalam-tindak-pidana-korupsi-lt58e921c313b7b> (diakses pada 19 Februari 2023).
- Idris, Muhammad, “Perjalanan Kasus BLBI Sjamsul Nursalim yang Rugikan Negara Rp4,5 Triliun”. <https://money.kompas.com/read/2021/04/09/071630926/perjalanan-kasus-blbi-sjamsul-nursalim-yang-rugikan-negara-rp-45-triliun?page=all> (diakses pada 26 September 2022).
- Indonesia Corruption Watch, “KASUS BLBI; SP3 Sjamsul Nursalim Dipraperadilan”, <https://antikorupsi.org/id/article/kasus-blbi-sp3-sjamsul-nursalim-dipraperadilan> (diakses pada 14 Februari 2023).
- Indonesia Corruption Watch, “Kejaksanaan Hentikan Penyidikan Sjamsul Nursalim [23/07/04]”, <https://antikorupsi.org/id/article/kejaksanaan-hentikan-penyidikan-sjamsul-nursalim-230704> (diakses pada 14 Februari 2023).
- Jaya, Didik Tri Putra, “Satgas BLBI Sita Aset Propersti Sjamsul Nursalim di Lampung”, <https://kupastuntas.co/2022/08/11/satgas-blbi-sita-aset-properti-sjamsul-nursalim-di-lampung> (diakses pada 25 Februari 2023).
- Kamil, Irfan, “Perjalanan Kasus Sjamsul Nursalim, Jadi Buron Bersama Sang Istri, hingga Penyidikan Dihentikan KPK”. <https://nasional.kompas.com/read/2021/04/02/07594471/perjalanan-kasus-sjamsul-nursalim-jadi-buron-bersama-sang-istri-hingga> (diakses pada 23 November 2022).
- Komisi Pemberantasan Korupsi, “Buku Informasi – Tindak Pidana Korupsi dan Komisi Pemberantasan Korupsi (Modul-05)”, hlm. 6-12, <https://aclc.kpk.go.id/materi-pembelajaran/hukum/buku/modul-tindak-pidana-korupsi-dan-komisi-pemberantasan-korupsi> (diakses pada 08 Oktober 2022).
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Ikhtisar Putusan Perkara Nomor 70/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian Formil dan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi

Pemberantasan Korupsi”.
https://www.mkri.id/public/content/persidangan/sinopsis/sinopsis_perkara_952_ikhtisar%2070_2019-edit.pdf. (diakses pada 21 September 2022).

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “SIARAN PERS: Ketentuan “Kedaluwarsa Penuntutan Pidana” dalam KUHP Diuji ke MK”,
https://www.mkri.id/public/content/infoumum/press/pdf/press_2438_12.9.22%2086.PUU-XX.2022%20KUHP%20I%20ASF.pdf#:~:text=Pasal%2078%20Ayat%201%20Angka,%2C%20sesudah%20delapan%20belas%20tahun%E2%80%9D (diakses pada 17 Februari 2023).

Medistiara, Yulida, “Setya Novanto Sempat Ajukan Praperadilan Lagi Sebelum ‘Hilang’”,
<https://nasional.tempo.co/read/1040240/praperadilan-setya-novanto-minta-status-tersangka-dibatalkan> (diakses pada 15 Februari 2023).

Niam, Syakirum, “Satgas BLBI Sita Tanah 41 Ribu M2 Milik Sjamsul Nursalim di Lampung”,
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220810094807-532-832681/satgas-blbi-sita-tanah-41-ribu-m2-milik-sjamsul-nursalim-di-lampung> (diakses pada 25 Februari 2023).

Prastiwi, Devira, “6 Hal Terkait Pro Kontra KPK Terbitkan SP3 Kasus BLBI”.
<https://www.liputan6.com/news/read/4524256/6-hal-terkait-pro-kontra-kpk-terbitkan-sp3-kasus-blbi> (diakses pada 21 September 2022).

Prihatin, Intan Umbari, “Pukat UGM Duga SP3 Kasus BLBI Sudah Direncanakan dalam Revisi UU KPK”,
<https://www.merdeka.com/peristiwa/pukat-ugm-duga-sp3-kasus-blbi-sudah-direncanakan-dalam-revisi-uu-kpk.html> (diakses pada 23 November 2022).

Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional BPHN, “Laporan Akhir Naskah Akademik Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana”,
https://bphn.go.id/data/documents/na_ruu_tentang_perampasan_aset.pdf (diakses pada 23 Februari 2023).

Puteri, Alfi Salima, “Satgas BLBI Sukses Amankan Aset Rp28,3 Triliun, Menko Mahfud Beri Apresiasi”,
<https://finance.wartaekonomi.co.id/read22234/satgas-blbi-sukses-amankan-aset-rp-283-triliun-menko-mahfud-beri-apresiasi> (diakses pada 25 Februari 2023).

Qorib, Fathan, “Dakwaan Miranda Daluwarsa”,
<https://www.hukumonline.com/berita/a/dakwaan-miranda-daluwarsa-lt500e6b14b18fa> (diakses pada 18 Februari 2023).

Ramadhan, Azhar Bagas, “SP3 Perdana, KPK Setop Kasus BLBI Sjamsul Nursalim!”. <https://news.detik.com/berita/d-5516910/sp3-perdana-kpk-setop-kasus-blbi-sjamsul-nursalim> (diakses pada 21 September 2022).

Retnowati, Esti, “Ketua Satgas Lantik Pokja Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI”,
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita/baca/24571/Ketua-Satgas-Lantik-Pokja-Satgas-Penanganan-Hak-Tagih-Negara-Dana-BLBI.html> (diakses pada 25 Februari 2023).

Retnowati, Esti, “Satgas BLBI Pastikan Aset Eks BLBI Dikelola Secara Prudent dan Akuntabel”,
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita/baca/28188/Satgas-BLBI-Pastikan-Aset-Eks-BLBI-Dikelola-Secara-Prudent-dan-Akuntabel.html> (diakses pada 24 Februari 2023).

Rozie, Fachrur, “SP3 Kasus BLBI, ICW Desak KPK Ajukan Gugatan Perdata Lewat Jaksa Pengacara Negara”.
<https://www.liputan6.com/news/read/4522278/sp3-kasus-blbi-icw-desak-kpk-ajukan-gugatan-perdata-lewat-jaksa-pengacara-negara> (diakses pada 21 September 2022).

Said, Abdul Azis, “Satgas BLBI: Sjamsul Nursalim Belum Lunasi Utang BDNI”,
<https://katadata.co.id/yuliawati/finansial/62ab131f33ffb/satgas-blbi-sjamsul-nursalim-belum-lunasi-utang-bdni> (diakses pada 25 Februari 2023).

Sani, Ahmad Faiz Ibnu, “Praperadilan Setya Novanto Minta Status Tersangka Dibatalkan”, <https://nasional.tempo.co/read/1040240/praperadilan-setya-novanto-minta-status-tersangka-dibatalkan> (diakses pada 15 Februari 2023).

Waruwu, Rizki Perdana Raya, “Praperadilan Pasca 4 Putusan MK”,
<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/artikel/Praperadilan%20Pasca%204%20Putusan%20MK.pdf> (diakses pada 5 Februari 2023).